



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MELLIA RAHMI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 622367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	286.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 437 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 286.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MANUAL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, JIMNY MANUAL Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.200.000.000
Sub Total	Rp.	1.636.500.000
III. HUTANG	Rp.	170.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.466.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.